

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat (Sularmi dan Suwarno, 2006).

Menurut Setiaji (2007) Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah (Sularmi dan Suwarno, 2007)

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Wahyundaru 2001 dalam Latifah dan Sabeni 2007). Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung

kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan saat ini.

Menurut Susilo dan Adi (2007) Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit oriented, namun masih jarang yang dilakukan pada lembaga atau organisasi non-profit oriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.**

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tegal dalam pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten Tegal jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada kinerja keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Tegal tahun anggaran 2008-2010.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Tegal
2. Mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Tegal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tegal

Diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah kabupaten Tegal.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan pihak fakultas.

3. Bagi Penulis

Diharapkan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap kemauan dan ketrampilan menulis. Disampingitu juga bermanfaat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten Tegal dan untuk membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

4. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi ; Otonomi Daerah, Tinjauan Akuntansi Pemerintahan, Tinjauan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengukuran Kinerja, Analisis Rasio Keuangan APBD dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini mencakup gambaran umum organisasi pemerintah daerah kabupaten Tegal dan hasil analisis rasio.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.